

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsumsi masyarakat yang kian meningkat sepanjang waktu membuat intensitas jumlah sampah juga semakin meningkat. Sampah – sampah yang muncul pun saat ini tidak hanya berada di darat namun juga dilaut. *Marine debris* merupakan sampah hasil dari konsumsi manusia yang menggenang di lautan karena pembuangan yang disengaja maupun tidak disengaja, dimana jenis sampah yang ada dikategorikan bermacam – macam.

Pembuangan sampah tersebut memunculkan berbagai jenis sampah yang ada di lautan. Berdasarkan *United Nations Environment Programme (UNEP) / Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)*, jenis sampah yang berada di lautan atau *marine debris* yang banyak dijumpai diantaranya seperti: plastik (dibentuk atau lunak), busa, tali, pelampung; Peralatan memancing; Putung rokok dan korek api; Metal (kaleng minuman dan tutup botol); Kaca (bola lampu dan botol kaca); Kayu olahan; serta Kertas karet dan kain (Pawar, Shirgaonkar, & Patil, 2016).

Dari berbagai jenis – jenis *marine debris* ini, sampah berjenis plastik memegang posisi tertinggi dalam jumlah dan dampak yang berbahaya. Dunia sendiri telah memproduksi plastik yang menunjukkan peningkatan di tiap tahunnya, jika pada tahun 1950 produksi plastik global sudah mencapai 2 juta ton per tahun maka hingga pada tahun 2015 jumlah produksinya bertambah menjadi 381 juta ton per tahun (Azanella, 2018). Bahkan kemungkinan jumlah tersebut dapat bertambah mengingat saat ini hampir semua barang hingga kemasannya menggunakan plastik. Dari jumlah produksi plastik tersebut tidak semua disiasati dengan baik, hanya ada 10% dari hasil produksi yang mendapat daur ulang sedangkan sekitar 75% sisanya menjadi *marine debris* (Schilling, 2014).

Kontribusi sampah plastik juga datang dari negara, melalui penelitian oleh Jenna Jambeck pada tahun 2010, dimana terdapat lima negara yang menjadi penyumbang *marine debris* melalui sampah plastik terbanyak di dunia, peringkat pertama ada pada Cina yang menyumbang 1.32 – 3.53 MMT (*Million Metric Ton*) per tahunnya, peringkat kedua yaitu Indonesia yang menyumbang 0.48 – 1.29 MMT, diikuti dengan Filipina dan Vietnam pada peringkat ketiga dan keempat dengan 0.28 – 0.75 MMT dan 0.28 – 0.73 MMT (Jambeck, et al., 2015).

Gambar 1.1 Peringkat Negara Berdasarkan Kesalahan Pengelolaan Jumlah Sampah Plastik Pada Tahun 2010

Rank	Country	Econ. classif.	Coastal pop. [millions]	Waste gen. rate [kg/ppd]	% plastic waste	% mismanaged waste	Mismanaged plastic waste [MMT/year]	% of total mismanaged plastic waste	Plastic marine debris [MMT/year]
1	China	UMI	262.9	1.10	11	76	8.82	277	1.32–3.53
2	Indonesia	LMI	187.2	0.52	11	83	3.22	10.1	0.48–1.29
3	Philippines	LMI	83.4	0.5	15	83	1.88	5.9	0.28–0.75
4	Vietnam	LMI	55.9	0.79	13	88	1.83	5.8	0.28–0.73
5	Sri Lanka	LMI	14.6	5.1	7	84	1.59	5.0	0.24–0.64
6	Thailand	UMI	26.0	1.2	12	75	1.03	3.2	0.15–0.41
7	Egypt	LMI	21.8	1.37	13	69	0.97	3.0	0.15–0.39
8	Malaysia	UMI	22.9	1.52	13	57	0.94	2.9	0.14–0.37
9	Nigeria	LMI	27.5	0.79	13	83	0.85	2.7	0.13–0.34
10	Bangladesh	LI	70.9	0.43	8	89	0.79	2.5	0.12–0.31
11	South Africa	UMI	12.9	2.0	12	56	0.63	2.0	0.09–0.25
12	India	LMI	187.5	0.34	3	87	0.60	1.9	0.09–0.24
13	Algeria	UMI	16.6	1.2	12	60	0.52	1.6	0.08–0.21
14	Turkey	UMI	34.0	1.77	12	18	0.49	1.5	0.07–0.19
15	Pakistan	LMI	14.6	0.79	13	88	0.48	1.5	0.07–0.19
16	Brazil	UMI	74.7	1.03	16	11	0.47	1.5	0.07–0.19
17	Burma	LI	19.0	0.44	17	89	0.46	1.4	0.07–0.18
18*	Morocco	LMI	17.3	1.46	5	68	0.31	1.0	0.05–0.12
19	North Korea	LI	17.3	0.6	9	90	0.30	1.0	0.05–0.12
20	United States	HIC	112.9	2.58	13	2	0.28	0.9	0.04–0.11

*If considered collectively, coastal European Union countries (23 total) would rank eighteenth on the list

Sumber: Jambeck, et al., 2015

Tingginya angka sampah – sampah yang menjadi *marine debris* juga mendorong banyak organisasi untuk terlibat dalam penanganan masalah sampah yang ada, salah satunya adalah *The Ocean Cleanup*. *The Ocean Cleanup* merupakan sebuah organisasi non-profit yang berasal dari Belanda yang memiliki fokus pembersihan sampah di lautan. Adanya *The Ocean Cleanup* ini juga mendorong negara – negara untuk melakukan kerjasama dengannya, salah satunya adalah Indonesia yang telah mencoba untuk bekerjasama dengan *The Ocean Cleanup* terkait dengan penanganan sampah pada tahun 2017.

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki masalah sampah laut melalui kontribusinya, dimana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh KLHK di 18 Kabupaten atau Kota pada tahun 2017, menunjukkan adanya perkiraan jumlah sampah laut sebanyak 1,2 juta ton dengan setiap satu meter persegi terdapat timbulan sampah laut yang rata – rata mencapai 106,385 gram (Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, 2019). Sampah berjenis plastik di laut seringkali berasal dari aliran sungai yang memiliki akhiran di laut, dimana di setiap hulu, tengah, dan hilir sungai juga ikut menyumbang adanya mikroplastik. Adapun perkiraan lain dari jumlah sampah laut di Indonesia menunjukkan dari total produksi sampah plastik sebanyak 64 juta per ton, sebanyak 3,2 juta tonnya dibuang ke laut berdasarkan data Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) (Sofuroh, 2019).

Adanya sampah laut di lingkungan perairan Indonesia maupun global tentunya membawa dampak – dampak yang membahayakan, diantaranya kehidupan biota dan ekosistem laut yang terancam karena sampah yang ada dapat masuk ke dalam rantai makanan ikan dan spesies lainnya, salah satu bukti dari hal ini adalah ditemukannya mikroplastik pada 28% ikan yang ada di pasar di Makassar (Ambari, 2017). Hal ini tentu membahayakan mengingat ikan – ikan tersebut akan dijual kepada konsumen yang nantinya mengonsumsi ikan tersebut dan membuat mikroplastik tadi dapat ikut masuk ke dalam tubuh manusia tanpa disadari, padahal dampak dari adanya mikroplastik dalam tubuh dapat memberi potensi penyakit kanker hingga mutasi gen (Damarjati, 2018). Tidak hanya itu, sampah di lautan juga dapat menyebabkan kerugian pada pariwisata karena adanya penurunan pengunjung akibat sampah laut, salah satunya terjadi di Bunaken, Manado dimana selama kurun waktu 7 tahun pengunjung disana mengalami penurunan hingga 65% (Ikanubun, 2016), tentunya hal ini dapat memberikan efek pada berkurangnya pendapatan mereka yang mengandalkan sektor ini sebagai mata pencaharian.

Sebelum bekerja sama dengan TOC, Indonesia telah membuat kebijakan sebagai upaya untuk penanganan masalah sampah melalui Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah

81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Adanya kedua Undang – Undang tersebut pada dasarnya penting untuk penanganan permasalahan sampah di hulu atau sumbernya, meskipun begitu kedua Undang – Undang tersebut masih belum efektif untuk dapat menangani permasalahan sampah yang menyebabkan sampah pada akhirnya dapat meluas ke wilayah lain seperti sungai dan pada akhirnya ke laut. Hal ini dikarenakan kurangnya implementasi dari Undang – Undang tersebut dimana peraturan yang dibuat tidak semua dijalankan, seperti rencana penutupan TPA *open landfill* pada pasal 44 UU 18 tahun 2008 (Quina & Erou, 2019), nyatanya TPA di Indonesia masih banyak yang menggunakan sistem tersebut padahal semestinya sudah mulai pembaruan sistem yang lebih baik untuk pengelolaan sampah di TPA seperti *sanitary landfill* atau bahkan *controlled landfill*. Selain UU 18 tahun 2008, UU Nomor 81 Tahun 2012 juga kurang dalam implementasinya. Pada pasal 38, sudah mengatur mengenai penyediaan fasilitas untuk pemilahan sampah yang terdiri dari 3 hingga 5 jenis diantaranya pemilahan sampah yang mengandung B3 dan LB3, sampah mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya. Meskipun begitu peraturan tersebut tidak terimplementasikan dengan baik bahkan hingga mencapai batas tenggat waktunya (Quina & Erou, 2019). Adanya implementasi yang kurang dari peraturan yang telah ada untuk pengelolaan sampah di darat tentunya dapat menimbulkan masalah sampah yang semakin luas dimana sampah yang tidak ditangani di sumbernya dapat meluas ke wilayah lain bahkan hingga ke laut apabila dibiarkan begitu saja.

Penelitian mengenai *marine debris* sendiri telah muncul pada beberapa waktu, namun antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis disini juga memiliki perbedaan pada topik penelitian yang dipilih. Penelitian – penelitian terdahulu mengenai *marine debris* diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Pawar, Shirgaonkar, & Patil, 2016), yang membahas mengenai sampah laut dan solusi - solusi efektif untuk penanganan sampah laut seperti *human management*. Selain itu, juga terdapat penelitian yang oleh (Purwaningrum, 2016) mengenai timbulan sampah plastik dan upayanya, dimana penelitian ini menguraikan mengenai

meningkatnya volume timbunan sampah karena adanya pertambahan jumlah penduduk, dimana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan 60-70% sampah organik dan 30-40% sampah non organik dengan 14%nya yang merupakan sampah plastik. Penelitian ini juga mengemukakan Indonesia sebagai penghasil sampah plastik terbanyak kedua di perairan setelah China menurut Jenna Jambeck yang berjumlah 187,2 juta ton. Dengan berfokus pada masalah plastik dari jenis hingga dampak lingkungan yang dihasilkan, penelitian ini memberikan upaya daur ulang plastik menjadi bahan bakar minyak untuk mengatasi masalah tersebut.

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh (World Bank, 2018), membahas mengenai perhitungan jumlah sampah laut yang ada di Indonesia termasuk penyebaran asal sampah atau komposisinya. Penelitian lainnya juga datang dari (Hakim, 2019), yang membahas mengenai masalah sampah plastik dan melihat upaya dari aspek hukum yang ada. Pada penelitian ini juga memberikan pembahasan masalah sampah laut dimana permasalahan yang ada datang dari perilaku masyarakat, dimana dengan populasi Indonesia yang sebanyak 232,8 juta menghasilkan sampah 38,5 juta ton setiap tahunnya dengan setiap orang yang menghasilkan sampah mencapai 0,45 kg setiap harinya, sampah – sampah tersebut tidak semua terkelola dengan baik karena jumlah sampah yang tidak diangkut dapat mencapai 16,78 juta ton per tahunnya. Adanya permasalahan sampah ini muncul karena kebiasaan serta gaya hidup masyarakat yang banyak memproduksi sampah sehingga dalam penelitian ini memberikan upaya dengan menanamkan pendidikan di masyarakat tentang pengelolaan dan kesadaran diri untuk menjaga lingkungan, juga dengan pembentukan peraturan sebagai landasan untuk mengelola sampah.

Selain itu, terdapat penelitian lainnya yang berasal dari (Hermawan & Sidik, 2019) yang membahas mengenai diplomasi maritim Indonesia melalui Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut 2018-2025, penelitian tersebut menggunakan teori Diplomasi Maritim untuk mendapatkan hasil penelitiannya yang mana menunjukkan bahwasanya diplomasi maritim dilakukan oleh Indonesia melalui upayanya atas Rencana Aksi Nasional yang menjadi momentum tersendiri

dengan berbasiskan UNCLOS dan bahwasanya rencana tersebut telah di implementasi ke beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Indonesia.

Perbedaan penelitian penulis dengan kelima penelitian sebelumnya tersebut adalah bahwasanya penulis lebih melihat pada upaya kerjasama internasional sebagai upaya penanganan sampah laut yang ada di Indonesia dengan mencegah sampah dari sumber yang berada di darat sebelum masuk ke dalam lautan, penulis pada penelitian ini juga lebih melihat adanya sinergi yang diberikan oleh pemerintahan suatu negara dengan suatu organisasi internasional untuk menangani permasalahan tertentu. Penulis juga menggunakan teori yang berbeda dari penelitian – penelitian sebelumnya, seperti penelitian dengan topik diplomasi maritim, penulis pada penelitian ini menggunakan teori lain yang berbeda dari teori tersebut yaitu ekologi manusia, manajemen lingkungan, *Green Political Theory*, kerjasama internasional, dan INGO. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai mengapa suatu negara bekerja sama dengan organisasi untuk menyelesaikan permasalahan domestik yang seharusnya diselesaikan sendiri oleh negara, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pada identifikasi masalah sampah dan upaya solusi dengan fokus yang berbeda terkait hal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini akan berangkat dari pertanyaan terkait dengan **Mengapa pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan *The Ocean Cleanup* dalam menangani masalah sampah?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa latar belakang dari kerjasama yang Indonesia lakukan dengan *The Ocean Cleanup* dalam penanganan sampah, mengingat bahwasanya latar belakang dari kerjasama bukan hanya akibat dari posisi Indonesia sebagai negara kedua terbesar penyumbang sampah, namun juga adanya kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam menangani permasalahan sampahnya dan *marine debris*. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini untuk melihat upaya penanganan permasalahan *marine debris*, yang

difokuskan melalui kerjasama internasional seperti yang dilakukan Indonesia dan *The Ocean Cleanup*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan pengetahuan terkhususnya dalam ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan analisa latar belakang kerjasama antara negara dengan organisasi internasional dalam menyelesaikan permasalahan domestik suatu negara. Manfaat lain adalah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan terutama untuk para studi Hubungan Internasional bahwa isu *marine debris* merupakan isu lingkungan global yang penanganannya dapat dilakukan dengan kerjasama internasional.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti lainnya dalam penelitian lebih lanjut mengenai kerjasama negara, serta dapat memberikan wawasan tambahan bagi pembaca dalam analisa kerjasama yang terjalin pada beberapa pihak seperti antar negara dan organisasi internasional.

3.5 Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1 Teori Ekologi Manusia

Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan, sementara ekologi manusia merupakan ilmu yang berfokus pada hubungan antara manusia secara khususnya dan lingkungan, dimana manusia memiliki kelebihan – kelebihan daripada makhluk hidup lainnya dan menjadikan hubungannya dengan lingkungan sebagai pemelihara atau perusak (Hadi, 2013).

Hubungan antara manusia dan lingkungan sendiri dibagi dalam tiga tahap menurut Hadi (2013), yaitu:

a. Tahapan *Pancosmism*

Merupakan evolusi pertama pada hubungan antara manusia dan lingkungan dimana manusia masih merasa bagian dari alam. *Pan* memiliki definisi kesatuan sementara *Cosmism* memiliki definisi yang merupakan alam semesta, sehingga *pancosmism* dapat didefinisikan sebagai menyatu dengan alam semesta. Pada tahapan ini, manusia masih melihat alam sebagai sesuatu yang sakral sehingga harus dijaga keserasiannya. Tahapan ini masih mengarah pada manusia primitif atau di jama dimana jumlah penduduk masih sedikit, sehingga meskipun mereka memanfaatkan alam, mereka masih mengambilnya dalam jumlah yang sedikit. Meskipun manusia memanfaatkan alam, mereka masih menganggap alam sebagai sesuatu hal yang sakral, sehingga terdapat pantangan – pantangan yang diyakini apabila merusak alam.

b. Tahapan *Antropocentrics*

Pada tahapan ini, terdapat pandangan yang mempengaruhi manusia untuk merasa bahwa mereka menguasai alam, padahal dengan menguasai alam dapat membuat bencana yang akhirnya berdampak pada manusia itu sendiri. Tahap evolusi ini ditandai dengan adanya jumlah penduduk yang kian meningkat dan teknologi serta ilmu yang juga semakin maju. Dengan semakin banyaknya populasi manusia maka semakin banyak juga kebutuhan yang ingin dicapai. Dikarenakan kebutuhan yang semakin banyak tersebut, lambat laun rasa dikuasai oleh lingkungan semakin hilang karena adanya keberanian dalam diri manusia untuk menundukkan atau menguasai lingkungan tadi, termasuk dengan adanya teknologi yang digunakan untuk menguasai alam.

c. Tahapan *Environmental Holism*

Adanya evolusi kedua tadi dimana manusia menguasai alam justru menimbulkan kerusakan – kerusakan terhadap alam itu sendiri karena adanya eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, pada tahapan evolusi ketiga ini mencoba membimbing manusia untuk memperbaiki hubungannya dengan alam. Akal manusia dalam tahap ini sudah tidak lagi mengenai kebebasan akan alam, namun diajak untuk dapat menjaga alam. Paham *holism* disini berkeinginan untuk manusia dapat memahami bahwa kerusakan lingkungan terjadi karena ulah mereka, karena kelestarian lingkungan juga muncul dari adanya kesadaran dari manusia karena keduanya saling berhubungan. *Environmental holism* disini juga menjadi jawaban dari sikap antroposentris dimana manusia menguasai alam yang menimbulkan adanya kerusakan – kerusakan alam nantinya.

Ketiga tahap tersebut menjadi tahapan yang akan membantu melihat penyebab dari terjalannya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan *The Ocean Cleanup* dalam menangani permasalahan sampah yang merupakan hasil dari aktivitas manusia yang berperilaku semaunya yang akhirnya menyebabkan permasalahan yang berujung ancaman kerusakan lingkungan, terutama lingkungan air.

1.5.2 Teori Manajemen Lingkungan

Manajemen lingkungan dapat didefinisikan sebagai pengelolaan yang difokuskan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada. Sementara itu manajemen lingkungan oleh Shrivastava dalam Buchholz (1998) dibagi ke dalam dua jenis yaitu manajemen tradisional dan manajemen ekosentris. Keduanya memiliki perbedaan pandangan, apabila manajemen tradisional berpangku pada kepentingan manusia atau antroposentris, maka

manajemen ekosentris lebih kepada makhluk hidup secara luas, bahkan menghargai yang bernyawa ataupun tidak, dari manusia, hewan dan tumbuhan atau elemen kehidupan sekalipun seperti air, udara dan tanah (Hadi, 2014).

Manajemen lingkungan juga memberikan ciri dari dampak lingkungan yang terjadi yaitu *common property*, *negative externality*, jangka panjang, dan non-monetized (Hadi, 2014). Dalam penelitian ini akan menggunakan ciri – ciri tersebut sebagai latar belakang kerjasama diantara Pemerintah Indonesia dan *The Ocean Cleanup*.

Dalam penelitian ini sendiri, akan difokuskan dalam penggunaan manajemen ekosentris daripada tradisional untuk melihat upaya dari Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah sampah yang apabila dibiarkan akan menambah masalah akan sampah laut. Manajemen ekosentris sendiri memiliki ciri yang mengacu pada produk berwawasan lingkungan sehingga pada akhirnya produk tersebut tidak hanya menjadi sampah, berbeda dengan tradisional yang lebih berfokus pada gaya hidup sebagai idealnya sehingga mayoritas produk hanya menghasilkan sampah (Hadi, 2014).

Manajemen ekosentris yang lebih berfokus pada keberlanjutan lingkungan hidup dengan manajemen tradisional yang berbasis manusia melalui pertumbuhan ekonomi, kehidupan yang mendominasi sumber daya, tentunya menghasilkan ciri yang berbeda dalam penanganannya pada masalah lingkungan melalui perbedaan strategi dan program. Dalam strateginya untuk menangani permasalahan lingkungan, manajemen ekosentris berfokus pada jangka panjang, keberlanjutan, serta penanganan berwawasan lingkungan dan sosial, berbeda dengan tradisional yang lebih kepada jangka pendek pada sumber masalah dan memberikan

efektivitas sementara untuk manusia ketika terjadi masalah lingkungan (Hadi, 2019).

1.5.3 Green Political Theory

Politik Hijau sebagai sebuah ideologi muncul pada abad ke-20 dengan pemikiran yang mengkritik pertumbuhan ekonomi dan teknologi sebagai sesuatu yang menimbulkan masalah lingkungan. Politik Hijau dimulai di Eropa dengan munculnya Gerakan lingkungan yang memicu perjanjian dalam penanganan masalah lingkungan pada tahun 1889 hingga 1950an. Teori Politik Hijau (*Green Political Theory*) menurut Tim Hayward dalam perkembangannya, merupakan teori yang berdasarkan pada fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan karenanya memicu adanya perilaku politik sesuai hal tersebut. Dari hal ini membuat GPT mengharuskan teori politik yang selaras dengan teori lingkungan, maksudnya melihat manusia sebagai *nature beings* atau lebih jauh sebagai *political animals* daripada sebagai individu yang rasional menurut liberalisme atau sebagai makhluk sosial menurut sosialisme. GPT memiliki karakteristik yang menurut Eckersley sesuai dengan konsep ekosentrisme, dimana kelangsungan lingkungan lebih penting daripada manusia, berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh pandangan antroposentrisme yang menganggap manusia sebagai pusat dari segalanya (Lestari, 2016).

Selain itu, GPT juga memiliki perbedaan pandangan dengan teori lain yang serupa yaitu environmentalisme, dalam memandang sebuah struktur ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Mathew Patterson (1996), jika environmentalisme menerima struktur yang sudah ada dan menggunakannya sebagai solusi suatu masalah lingkungan, maka GPT lebih memihak kepada perubahan struktur yang memiliki perhatian utama dalam masalah tersebut, karena

mereka menganggap struktur yang sudah ada merupakan akar dari masalah lingkungan yang terjadi (Apriwan, 2011).

Green Political Theory seluruh dunia memegang prinsip empat pilar, yakni Ekologi (*ecological wisdom/ecological sustainability*), Keadilan Sosial (*social equality & economic justice*), Demokrasi kerakyatan (*grassroots democracy*), dan Tanpa kekerasan (*non-violence*). Berdasarkan empat prinsip global *Green Political Theory* tersebut, maka kegiatan partai hijau harus berlandaskan kepada prinsip tersebut (Lestari, 2016). Adapun dari keempat tersebut, terdapat enam prinsip lainnya yaitu Desentralisasi, Ekonomi Berbasis Komunikasi dan Berkeadilan, Feminisme dan Kesetaraan Gender, Penghormatan Terhadap Keberagaman, Tanggung Jawab Personal dan Global, serta Fokus pada Masa Depan dan Keberlanjutan (Aiman & Supriyadi, 2014).

GPT menentang adanya ide pembangunan modern karena akan menambah masalah pada ekologi maupun manusia dan beranggapan bahwa pembangunan yang berdasar pada ekologi (*ecological development*) lebih tepat dilakukan (Ari & Gokpinar, 2019). Pembangunan berbasis ekologi menurut GPT ini juga termasuk pada *sustainability* yang dimaksud oleh GPT, sehingga bukan pembangunan pada umumnya yang menjadi perhatian GPT namun lebih mengupayakan menjaga keseimbangan ekologi yang nantinya juga berdampak pada perlindungan terhadap manusia (Yusran & Asnelly, 2017).

Green Political muncul sebagai ide yang mendasari gerakan sosial dan politik melalui *Green Parties*. Partai hijau sendiri banyak ditemui di Eropa dengan fokus membawa isu lingkungan. Namun terkadang ada negara yang tidak memiliki partai hijau contohnya Indonesia, tetapi partai politik yang dimiliki negara tersebut masih

menaruh perhatian terhadap isu lingkungan sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam agenda politiknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agenda yang dilakukan oleh aktor politik negara merupakan wujud GPT dalam menangani permasalahan lingkungan hidup.

Selain itu, GPT memiliki pemikiran yang berada dalam *Green Thought* atau eklogisme, berbeda dengan environmentalisme yang berada dalam *Thinking Green* atau pemikiran yang bersifat antroposentris. Pemikiran *Green Thought* disini berdiri pada asumsi bahwa ada hubungan antara manusia dan lingkungan yang juga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Maka dari itu, *Green Thought* memberikan cara pandang untuk hubungan manusia dan ekosistem, dimana manusia harus memelihara lingkungan untuk keberlangsungan semua makhluk hidup (Rani, 2013). Sehingga jika melihat dari asumsi tersebut, GPT juga menyetujui cara yang terbaik untuk dapat memelihara lingkungan yang ada secara global, termasuk adanya kerjasama antar aktor – aktor yang ada untuk menangani permasalahan lingkungan baik domestik maupun global, seperti kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan *The Ocean Cleanup*.

1.5.4 INGO

Dalam Hubungan Internasional terdapat dua macam aktor yaitu aktor negara dan aktor non negara. Aktor negara merupakan negara yang berdaulat seperti Indonesia, Singapura, Belanda, sedangkan aktor non-negara bentuknya bermacam – macam yang terdiri dari perusahaan multinasional (*Multinational Corporation* (MNC)), organisasi pemerintah internasional (*International Governmental Organization* (IGO)), organisasi non pemerintah internasional (*International Non-Governmental Organization* (INGO)), kejahatan transnasional yang terorganisir (*Transnational*

Organized Crime (TOC)), dan jaringan teroris internasional. Salah satu contohnya adalah *International Non-Governmental Organization* (INGO), INGO merupakan organisasi nonprofit yang biasanya berfokus dan berusaha memperjuangkan masalah – masalah yang ada seperti masalah kemanusiaan dan lingkungan hidup dalam skala internasional (Margono, 2015).

INGO juga dapat didefinisikan sebagai organisasi yang menampung orang – orang dengan perhatian yang sama akan suatu permasalahan. Dalam sejarahnya, pada tahun 1970an, negosiasi internasional melihat bahwa desentralisasi dirasa perlu untuk mengatasi permasalahan lingkungan karena konsumsi masyarakat meningkat bersamaan dengan masalah lingkungan, maka dari itu diperlukan solusi dari lembaga publik dan intervensi pada kebijakan publik secara nasional. Kemudian pada tahun 1980an, dimulailah pendekatan partisipasi semua aktor untuk tata kelola lingkungan yang dilanjutkan hingga tahun 1990an dimana pengaruh NGO meningkat setelah masalah lingkungan menjadi fokus dimensi baru yang membutuhkan solusi untuk menghadapi permasalahan lingkungan yang ada (Ayna, 2018).

INGO sangat membantu dalam beberapa penanganan karena masing – masing dari mereka sudah memiliki fokusnya sendiri, salah satunya organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang lingkungan. INGO juga memiliki peran yang cukup penting, mereka dapat membawa suatu isu yang kurang menoleh perhatian publik hingga pemerintah melalui *framing* (pembingkaihan) yang mereka lakukan. Misalnya, isu lingkungan, banyak isu kerusakan lingkungan yang timbul namun minim perhatian dan respon. Hal ini membuat INGO lingkungan, melakukan pembingkaihan yang menyerukan adanya kerusakan lingkungan hingga dampak – dampak yang ditimbulkan. Pembingkaihan ini juga dapat berbentuk

seruan dalam kampanye publik maupun penyampaian aspirasi langsung ke khalayak lainnya. Adanya seruan tersebut diharapkan dapat memperoleh perhatian masyarakat secara luas dan juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk segera merespon dan membuat solusi akan adanya kerusakan lingkungan tersebut.

Dalam hubungan internasional, hubungan dari para aktor negara dan aktor non-negara dapat dilihat melalui kerjasama yang terjalin diantara kedua pihak. Negara tumbuh seperti layaknya makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Di beberapa bidang, negara akan membutuhkan bantuan pihak lain baik sesama negara maupun dengan aktor non-negara berupa INGO sekalipun. Banyak masalah yang sering terjadi dalam ranah domestik suatu negara yang terkadang tidak dapat diatasi oleh negara itu sendiri. Disinilah INGO hadir dengan fokus yang juga berkaitan dengan masalah yang terjadi di suatu negara. Kerjasama antara negara dan INGO juga terkadang digambarkan sebagai bentuk kelemahan, ketidakmampuan, dan ketidakefektifan negara terkait dengan penanganan masalah yang notabene merupakan masalah domestiknya sendiri.

Dalam penyelesaian masalah domestik negara, negara akan mengajak bekerjasama dengan INGO yang memiliki fokus yang sejalan atau saling bersinergi. Misal, terkait permasalahan lingkungan di wilayah domestik negara, negara akan mengajak kerjasama INGO yang juga fokus pada bidang lingkungan dengan tujuan yang tidak jauh berbeda dengan keinginan negara dalam penyelesaian masalah lingkungan di wilayah domestiknya. Kerjasama negara dengan INGO juga dapat dikatakan sebagai keberhasilan dari pbingkaiian suatu isu yang dilakukan oleh INGO. Keberhasilan pbingkaiian yang dilakukan oleh INGO juga dapat terlihat dari kemampuan mereka untuk mengambil peran

dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh suatu negara, yang disini salah satunya dicontohkan dalam pelaksanaan kerjasama yang diajukan oleh negara. Negara bisa saja tidak terlalu peduli pada masalah lingkungan di negaranya, namun karena adanya pemingkiaan dari INGO, negara seakan – akan tersindir dan mencoba menaruh fokus pada permasalahan dibingkai oleh INGO tadi. Hal ini dikarenakan pemingkiaan suatu isu oleh INGO beberapa ada juga yang secara langsung dan tidak langsung sebagai kritikan terhadap negara.

Selain itu, peranan yang NGO miliki sebagai organisasi internasional, oleh Olena P. Maslyukivska yang merupakan seorang ahli lingkungan hidup asal Ukraina, diringkas dalam enam kategori, yaitu : (Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dan Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri , 2011)

1. *Development and operation of infrastructure;*
2. *Supporting innovation, demonstration and pilot project;*
3. *Facilitating communications;*
4. *Technical assistance and training;*
5. *Research, monitoring and evaluation;*
6. *Advocacy for and with the poor.*

INGO juga memiliki fungsi menurut Lewis dan Kanji, yang dikategorikan sebagai: *Implementer*, yaitu fungsi untuk penyediaan kebutuhan dengan memobilisasi sumber daya ke masyarakat, seperti layanan kesehatan, bantuan sosial, maupun penyediaan hak asasi manusia; *Catalyst*, yaitu dapat didefinisikan sebagai perubahan yang dibawa oleh seseorang, fungsi ini dimiliki oleh INGO karena dianggap dapat menginspirasi, memfasilitasi, atau berkontribusi untuk mempengaruhi pemikiran yang berujung pada terjadinya

perubahan, INGO juga berfungsi sebagai pemantau tindakan dan kebijakan pemerintah dalam implementasinya ke masyarakat; dan terakhir, yaitu fungsi *Partnership*, yang mengacu pada hubungan kerjasama atau kemitraan yang dijalani oleh INGO dengan pihak lain seperti pemerintah suatu negara, sektor privat, maupun donor untuk membantunya mencapai tujuan (Bleszynski, 2019).

1.5.5 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional adalah suatu kondisi dimana para aktor, baik antara sesama aktor negara maupun dengan aktor non negara (organisasi internasional, transnasional, dan lainnya) saling berhubungan untuk mencapai adanya tujuan yang selaras diantara keduanya. Keohane dan Nye (2001) mendefinisikan kerjasama internasional sebagai kerjasama yang dilakukan negara dengan non-negara karena adanya kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan dan kepentingan yang sama. Adapun indikator keberhasilan kerjasama sendiri menurut Robert O. Keohane dan Robert Axelrod (1985) menyangkut kesamaan kepentingan, jumlah aktor yang terlibat, dan bayangan masa depan (Bagaskara, 2018).

Kerjasama internasional menurut Kalevi Jaakko Holsti, juga diartikan sebagai pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus; pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai – nilainya; persetujuan atau masalah – masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan; aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka. Kerjasama internasional

biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasional negara yang tidak dimilikinya sehingga negara perlu mencari atau memenuhi kepentingan nasionalnya dengan memperjuangkannya di luar negeri. Kerjasama akan dilakukan jika negara merasa keuntungan atau manfaatnya lebih besar dari kerugian yang akan dihasilkan (Zulkifli, 2012).

Kerjasama internasional biasanya mencakup dalam beberapa bidang kerjasama seperti ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Adapun empat bentuk kerjasama internasional yaitu: (Kusumohamidjojo, 1987)

1. Kerjasama universal (global)

Kerjasama jenis ini diperuntukkan untuk menyatukan semua bangsa di dunia sebagai cita – cita bersama untuk integrasi maupun menghindari disintegrasi internasional.

2. Kerjasama regional

Kerjasama jenis ini didasari oleh kedekatan dari segi geografis pihak – pihak didalamnya. Selain faktor geografis, adapula faktor kesamaan politik dan budaya ataupun faktor lainnya yang dapat mendasari terjalannya kerjasama regional.

3. Kerjasama fungsional

Kerjasama fungsional mengacu pada bentuk kerjasama yang pihak – pihaknya saling mendukung fungsi yang ada, fungsi yang didukung juga disesuaikan dengan masing – masing negaranya. Kerjasama fungsional ini akan terjalan apabila semua pihak didalamnya saling mendukung fungsi yang dimiliki salah satu pihak atau fungsi spesifik untuk bersama.

4. Kerjasama ideologis

Kerjasama ini dilandasi oleh ideologi yang sama diantara pihak – pihak didalamnya, ada berbagai kelompok kepentingan yang menggunakan kerjasama sebagai cara untuk mencapai tujuannya, yang disini adalah ideologis.

Kerjasama internasional juga memiliki fungsi seperti sebagai cara untuk mencapai tujuan dari pihak – pihak yang ada dalam kerjasama; sebagai wadah penyalur teknologi, kemampuan, nilai (*value*) antar sesama pihak; kerjasama juga dapat digunakan sebagai pengerat hubungan antara sesama aktor – aktor yang menjalin kerjasama tersebut. Kerjasama internasional tentu penting dan akan bermanfaat untuk dilakukan mengingat negara belum tentu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang berjenis kualitatif untuk menganalisa secara mendalam terkait dengan kerjasama antara Indonesia dan *The Ocean Cleanup*. Metode kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang berusaha mencari apa yang ada dan tersembunyi di dalam suatu fenomena, penelitian kualitatif juga didefinisikan oleh Bogdan & Biklen (1992) sebagai penelitian yang menghasilkan deskripsi atas perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, maupun organisasi untuk mendapatkan suatu pemahaman dari hasil analisa (Rahmat, 2009).

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang berjenis deskriptif dan eksplanatif. Penelitian dengan tipe deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, mendalami, hingga menjelaskan suatu fenomena yang diteliti (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018), sehingga dalam penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan kerjasama pemerintah Indonesia dan *The Ocean*

Cleanup sebagai sebuah fenomena yang diteliti. Tidak hanya berjenis deskriptif, penelitian ini juga berjenis eksplanatif yang memiliki tujuan untuk melihat pada hubungan yang bersifat sebab-akibat diantara fenomena yang diteliti (Siyoto & Sodik, 2015), sehingga pada penelitian ini juga melihat hubungan sebab-akibat dari adanya masalah sampah laut yang mengakibatkan terjalannya kerjasama internasional antara pemerintah Indonesia dan *The Ocean Cleanup* untuk penanganan permasalahan tersebut.

1.6.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini difokuskan pada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan *The Ocean Cleanup* pada tahun 2017-2019, sebagai upaya penanganan masalah sampah.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan berasal dari data sekunder yaitu dengan melakukan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan melalui akses jurnal, buku, artikel, website berita *online*, hingga website resmi pemerintah maupun organisasi internasional terkait dengan sampah laut dan penanganannya, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, *The Ocean Cleanup*, dan pihak lainnya.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data penelitian yang diperoleh dari beberapa cara tertentu seperti wawancara hingga studi pustaka sampai selanjutnya dapat digunakan sebagai informasi ke orang lain (Hardani, Andriani, & dkk, 2020). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kongruensi. Menurut George dan Bennett (2005), metode kongruensi didefinisikan sebagai metode yang menilai kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori dan konsep yang ada

(Bergmann, 2019). Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisa data melalui pencarian kecocokan antara variabel penelitian yaitu latar belakang kerjasama pemerintah Indonesia dan *The Ocean Cleanup* dengan ekologi manusia, manajemen lingkungan, dan *Green Political Theory* sebagai teori yang digunakan, termasuk kerjasama internasional dan INGO untuk melihat keterlibatan kecocokan dengan variabel penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dibagi dalam empat bab, yaitu Bab I yang membahas mengenai gambaran akan penelitian ini yang berisikan latar belakang penelitian termasuk tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori yang digunakan, hipotesa, metodologi hingga sistematika penulisan.

Pada Bab II, dibahas secara mendalam mengenai masalah sampah secara global dengan dampak – dampak yang dihasilkan dan upaya yang dilakukan pihak – pihak tertentu untuk penanganannya. Selain itu, pada Bab ini juga akan membahas mengenai masalah sampah di Indonesia yang menjadi latar belakang kerjasama yang terjalin, dengan memberikan jumlah hingga sumber sampah serta dampak yang ada dari masalah sampah ini.

Selanjutnya dalam Bab III, pembahasan berupa deskripsi mendalam terkait dengan organisasi *The Ocean Cleanup*, dan upaya – upayanya untuk menangani permasalahan *marine debris*. Pada Bab ini juga akan membahas mengenai kerjasama antara Indonesia dan *The Ocean Cleanup* serta kegiatan menganalisa yang dihubungkan dengan kerangka teori yaitu peran dan fungsi INGO, kerjasama internasional, dan analisa dari teori ekologi manusia, manajemen lingkungan serta indikator dari *Green Political Theory* untuk menghasilkan jawaban dari penelitian.

Terakhir, Bab IV yang memberikan kesimpulan akan penelitian yang telah dilakukan dan hasil penelitian yang sudah didapatkan, serta memberikan saran – saran untuk kedepannya.